Implementasi Program UPSUS PAJALE (Upaya Khusus Padi Jagung Kedelai) Dalam Rangka Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan)

Fanni Shafiani^{a*}

^a Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, NTB, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim tanggal: 09 Januari 2019

Revisi pertama tanggal: 18 Januari 2019

Diterima tanggal: 10 April 2019

Tersedia online tanggal: 23 April 2019

Keywords: public policy, implementation, UPSUS PAJALE

ABSTRACT

Agriculture is an important sector for development in Indonesia, most of the population of Indonesia earns a living in this sector as well as the main support of the national economy, How it implementation UPSUS PAJALE program in Sumbawa Regency?. The research method used is a qualitative method with a Grindle implementation model (1980). This study resulted in the finding that the implementation of the UPSUS PAJALE program was easy to implement in Sumbawa Regency because of the findings of non-compliance with SRI (System Rice Intensification) activities due to the limitations of farmers' ability to absorb innovation technology and the gratification of CPCL determination. Theres no attraction between government, society and the private sector, interests are homogeneous so that implementation is easy to implement. This research can be useful as an input to the relevant agencies to plan the next program to be more targeted.

INTISARI

Pertanian merupakan sektor penting bagi pembangunan di Indonesia, sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian disektor ini dan juga penompang utama ekonomi nasional. Bagaimana implementasi UPSUS PAJALE di Kabupaten Sumbawa?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan model implementasi Grindle (1980). Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa implementasi program UPSUS PAJALE mudah dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa dikarenakan adanya temuan ketidakpatuhan pada kegiatan SRI (*System Rice Intensification*) karena keterbatasan kemampuan petani pada penyerapan teknologi inovasi serta adanya gratifikasi pada penetapan CLCP (Calon Lahan Calon Petani). Tidak adanya tarik menarik kepentingan antara pemerintah, masyarakat dan swasta, kepentingan bersifat homogen sehingga implementasi mudah dilaksanakan. Penelitian ini dapat berguna sebagai masukan kepada instansi terkait untuk melakukan perencanaan program selanjutnya agar lebih tepat sasaran.

2019 FIA UB. All rights reserved.

* Corresponding author. Tel.: +62-852-3989-8583; e-mail: fannishafiani04@gmail.com

1. Pendahuluan

Pangan adalah suatu kebutuhan asasi manusia, dalam memenuhi kebutuhan pangan manusia memiliki strategi beranekaragam. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia melakukan *food hunting* dan *gathering* karena belum berkembangnya pengetahuan manusia tentang budidaya pertanian.

Ketika populasi manusia berkembang dengan laju cukup tinggi. Seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Sistem Budidaya Pertanian No 12 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa budidaya tanaman merupakan bagian dari pertanian yang perlu diperhatikan, agar menjadikan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk mewujudkan pertanian maju, efisien, dan tangguh. Kelebihan penduduk berpengaruh terhadap sektor pertanian mengakibatkan terancamnya ketahanan pangan (*food security*) yang berakibat pada ketahanan bangsa, karena kebutuhan pangan yang berpotensi meningkatnya inflasi.

Komponen pertama merupakan sintesis dari swasembada pangan dengan konsep kemandirian pangan. Kebutuhan masyarakat terpenuhi oleh produksi yang dihasilkan oleh petani di Indonesia, perkembangan saat ini pemenuhan kebutuhan tidak dapat dicapai oleh produksi dalam negeri maka pemerintah membuka 'kran' impor dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Masuknya barang dari luar negeri merupakan upaya tidak terjadinya kekurangan pasokan pangan dapat berakibat pada kestabilan negara, setiap warga negara memiliki hak untuk dilindungi kebutuhan primernya dimana pemerintah berkewajiban dengan segala upaya agar tidak terjadi keadaan yang tidak stabil. Kebutuhan pangan menjadi permasalahan utama sejak jaman kemerdekaan.

Menurut Yuwono et al, (2011:34) dalam Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) di Indonesia yang dimulai Tahun 1969 pertanian mendapat prioritas pertama. Sebelum Repelita Indonesia juga sudah mempunyai rencana – rencana pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Lima Tahun 1952 – 1962; Rencana Pembangunan Tiga Tahun 1959-1962 swasembada bahan makanan yang dikenal dengan Plan Kasimo; Rencana Pembangunan Semesta Berencana dengan beberapa tahapnya, dan sebagainya.

Swasembada pangan yang dapat diraih pada Tahun 1984 merupakan kebijakan pemerintah era Soeharto dalam pembangunan pertanian yang dilaksanakan di Indonesia. Pada saat itu Revolusi Hijau merupakan salah satu kebijakan pemerintah dibidang pertanian, semua rencana pembangunan tersebut menempatkan pertanian sebagai prioritas pembangunan utama. Swasembada yang diharapkan adalah swasembada berkelanjutan. Konsep swasembada pangan telah bergeser dari konsep produksi ke konsep pemenuhan konsumsi. Kebutuhan konsumsi pangan dan produksi yang bisa dihasilkan harus

seimbang. Berbagai upaya untuk mencapai swasembada pangan.

Kabinet kerja menetapkan ada pencapaian swasembada pada komoditi padi, jagung dan kedelai, dalam kurun waktu tiga tahun. Adapun target produksi yang harus dicapai pada Tahun 2015 adalah produksi padi sebesar 73,40 juta ton; jagung sebesar 20,33 juta ton; dan kedelai sebesar 1,27 juta ton. Dengan dasar hukum Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 423/Kpts/OT.050/7/2015 yang dituangkan pada Permentan No 03 Tahun 2015 tentang UPSUS PAJALE. Upaya Khusus (UPSUS) ini bertujuan untuk mencapai swasembada pangan pada tiga komoditi, yaitu padi, jagung, dan kedelai (PAJALE) pada Tahun 2017.

Kabupaten Sumbawa memiliki potensi pertanian yang besar khususnya jagung, realisasi areal luasan sebanyak 75.407 ha, pencapaian sektor pertanian menetapkan Kabupaten Sumbawa sebagai lumbung pangan nasional. Pelaksanaan program UPSUS PAJALE dapat mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan. Merilee S. Grindle (1980) mengemukakan bahwa kebijakan identik dengan program-program kegiatan yang memiliki tujuan mencapai sesuatu yang dicita-citakan, merupakan penjabaran dari keputusan politik, ke dalam organisasi birokrasi dan siapa yang akan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Penelitian ini berfokus pada implementasi dengan menggunakan dasar Teori Merilee S. Grindle (1980). Menurut Grindle suatu implementasi keberhasilannya ditentukan oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi program UPSUS PAJALE di Kabupaten Sumbawa.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pada implementasi program pemerintah dan perbaikan pada perencanaan, khususnya program pertanian dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani.

2. Teori

2.1 Kebijakan Publik

Menurut Robert Eyestone sebagaimana dikutip oleh Winarno (2014) mengungkapkan bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Kebijakan harus memiliki pengertian apa adanya konsep yang ditawarkan adalah mengandung pengertian yang sangat luas. Pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya harus dilakukan, ketimbang apa yang diusulkan dan menjadi tindakan pada proses kebijakan, dalam hal ini pemerintah melakukan tindakan kepada masyarakat dipilih oleh

pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Definisi kebijakan publik menurut Eyeston ini dapat diklasifikasikan sebagai suatu proses manajemen, yaitu fase dari serangkaian kerja pejabat publik. Pemerintah yang mempunyai andil untuk melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dalam menyelesaikan masalah publik, sehingga definisi ini juga dapat diklasifikasikan dalam bentuk intervensi pemerintah yang diwujudkan dalam suatu implementasi.

Secara umum implementasi kebijakan terbagi atas dua kelompok menurut Matland (1995) sebagaimana dikutip oleh Hamdi (2014:98), yakni pendekatan dari atas (*top down*) dan kelompok pendekatan dari bawah (*bottom up*).

2.2 Implementasi Model Merilee S. Grindle

Pendekatannya dikenal dengan *Implementatioan as A Politcal and Administrative Process*. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle juga ditentukan oleh tingkat *Implementability* yang terdiri atau *Content of Policy* dan *Context of Policy*.

Adapun tingkat Implementasi Grindle adalah

karakteristik dari lembaga dan daya tanggap dan kepatuhan (dapat dilihat pada gambar 1).

2.3 Kebijakan Pembangunan Pertanian dan Swasembada

Pembangunan pertanian merupakan kebijakan yang dapat dilakukan bersama konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dari sejak jaman kemerdekaan sampai sekarang penguasa memiliki keputusan dalam melakukan kebijakan disektor pertanian, untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Swasembada pangan nasional berarti kita sebagai bangsa mampu dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, yang didalamnya terdapat berbagai kegiatan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, terutama beras sebagai makanan pokok penduduk Indonesia.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena penulis bermaksud mendeskripsikan sebuah fenomena. Diharapkan dengan pendekatan kualitatif dapat menafsirkan fenomena yang terjadi dengan melakukan wawancara, observasi dan dilakukan triangulasi data untuk menjelaskan fenomena yang ada.

Gambar 1 Model Implementasi Marilee S. Grindle
Grindle (1980:11)

Content of Policy menurut Grindle yang dapat diartikan sebagai kepentingan yang dipengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambil kebijakan, pelaksana program, dan sumberdaya yang dikerahkan. Sedangkan lingkungan implementasi adalah: kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat,

Adapun fokus penelitian ini adalah bagaimana implementasi Program UPSUS PAJALE di Kabupaten Sumbawa yang didasarkan pada:

- Isi Kebijakan
 - Kepentingan yang mempengaruhi;
 - Tipe manfaat;

- Derajat perubahan yang diinginkan;
- Letak pengambilan keputusan;
- Pelaksana program; dan
- Sumberdaya yang dikerahkan.

b) Konteks Implementasi

- Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat;
- Karakteristik lembaga dan penguasa; dan
- Kepatuhan dan daya tanggap.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Isi Kebijakan

4.1.1 Kepentingan yang mempengaruhi

Kebijakan setelah otonomi daerah memberikan kewenangan untuk mengelola suatu sumberdaya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Kebijakan tersebut memiliki kepentingan, semakin banyak kepentingan dalam maka akan semakin sulit kebijakan itu diimplementasikan. Semua ini tergabung dalam suatu subsistem, Hamdi (2014:69) menyebutkan kumpulan kepentingan ini berkaitan dengan masalah kebijakan, baik kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat maupun bisnis. Subsistem menjadi wahana bagi para pemilik kepentingan untuk melakukan tawar menawar dan saling meyakinkan dan mengejar kepentingan masing – masing.

Pemerintah memiliki kepentingan terhadap peningkatan produksi dan produktivitas, baik pada komoditi padi, jagung dan kedelai. Indonesia sampai saat ini masih mengimpor padi, jagung dan kedelai, maka dengan peningkatan produksi dan produktivitas diharapkan impor komoditi tersebut dapat dikurangi atau dihilangkan. Dengan adanya kepentingan ini pemerintah mendorong agar program UPSUS PAJALE terlaksana dengan baik.

Petani memiliki kepentingan untuk meningkatkan pendapatan dari hasil usaha tani, sehingga kesejahteraannya pun meningkat. Peningkatan pendapatan tersebut dapat diraih karena meningkatnya hasil panen, hasil panen meningkat karena produksi dan produktivitas para petani meningkat, sehingga naiknya nilai jual, yang pada akhirnya pendapatan petani juga meningkat.

Kepentingan swasta dalam mendukung program UPSUS PAJALE adalah interaksi untuk mencapai tujuannya itu peningkatan produksi dan produktivitas. Pupuk, pestisida, benih, alsintan dan hasil panen para petani merupakan sarana yang dikelola oleh pihak swasta. Kebijakan yang mampu mengakomodasi berbagai pandangan dan kepentingan yang berbeda, dalam hal ini program UPSUS PAJALE ketiga pihak yang memiliki kepentingan berjalan bersama dan saling mendukung, dapat disimpulkan program ini lebih mudah diimplementasikan.

4.1.2 Tipe Manfaat

Kebijakan yang jelas memberikan manfaat yang berwujudkan lebih mudah dilaksanakan. Dengan arti bahwa semakin dapat dirasakan manfaatnya akan semakin mudah dalam implementasinya, demikian sebaliknya apabila tidak jelas kemanfaatannya, atau tidak dapat dirasakan langsung dan bersifat khusus hasilnya akan dirasakan jangka panjang atau menengah akan sulit dalam implementasinya. Berikut manfaat dari kegiatan-kegiatan program UPSUS PAJALE:

Tabel 1 Manfaat kegiatan dalam Program UPSUS PAJALE

No	Kegiatan	Manfaat
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Lebih luasnya jangkauan pelayanan pengairan serta meningkatnya IP komoditi, yang dimaksud dengan meningkatnya IP (Indeks Pertanaman)
2	Optimalisasi Lahan	Peningkatan produktivitas berkurangnya biaya produksi dari penyediaan pupuk dan benih
3	Pengembangan SRI (<i>System Rice Intenfication</i>)	Budidaya padi sehat mendapatkan beras organik dan mengurangi penggunaan benih
4	Gerakan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT)	Deseminasi teknologi spesifik lokasi kepada petani
5	Optimalisasi PAT-PIP Kedelai dan PAT Jagung	Meningkatnya produksi dan produktivitas jagung dan kedelai
6	Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian	Efisiensi tenaga kerja, waktu dan biaya produksi.
7	Pengendalian Organisme Tanaman dan Dampak Perubahan Iklim	Pengamanan terhadap OPT dan adaptasi mitigasi tanaman pangan
8	Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	Terlindungnya kerugian nilai ekonomi dari usaha tani akibat banjir, kekeringan dan serangan OPT
9	Pengawasan dan Pendampingan	Berkembangnya kemampuan dan keswadayaan petani sebagai pelaku utama

Sumber: Hasil analisis, 2018

Pada penelitian implementasi program UPSUS PAJALE dapat diketahui bahwa tipe manfaat dari setiap kegiatan, dapat berupa barang fisik dan non fisik yang manfaatnya ada yang dirasakan langsung maupun tidak langsung. Pada kegiatan penyediaan sarana prasarana pupuk bersubsidi manfaat dapat dirasakan langsung oleh kelompok sasaran (*target group*) karena dapat mengurangi biaya produksi secara nyata. Sedangkan pada kegiatan penyediaan sarana dan prasarana berupa bantuan alsintan manfaat tidak dapat dirasakan langsung karena petani masih belum dapat mengoperasikan alat mesin pertanian yang diberikan, kurangnya materi pendukung lainnya, sehingga mengurangi manfaat dari bantuan mesin pertanian.

4.1.3 Derajat Perubahan yang Diinginkan

Sebuah program dilaksanakan karena ada tujuan yang ingin dicapai, target dari suatu pencapaian. Tujuan dari implementasi sendiri adalah dari keadaan yang dicita-citakan dari keadaan sekarang. Derajat perubahan pada produksi dan produktivitas belum mencapai swasembada ke produksi dan produktivitas yang mampu mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan. Adapun cara perubahan peningkatan produksi dan produktivitas melalui berbagai kegiatan dalam program UPSUS PAJALE.

Peningkatan kesejahteraan merupakan perubahan yang ingin dicapai pada program UPSUS ini, bantuan yang diberikan kepada masyarakat petani dari berbagai kegiatan menunjukkan perubahan kesejahteraan yang dirasakan petani langsung. Dilihat dari perubahan fisik rumah petani yang dahulunya hanya gubug yang berbahan kayu sekarang menjadi rumah dengan bahan tembok.

4.1.4 Letak Pengambil Keputusan

Pembuatan keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembuatan kebijakan, dapat dikatakan pembuat keputusan merupakan hasil dari kebijakan yang telah dibuat mengingat kebijakan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Dalam program UPSUS PAJALE pengambil keputusan berada di tangan Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa dibuktikan adanya berbagai program kegiatan dengan sokongan anggaran. Merupakan tugas pemerintah untuk menjalankan fungsinya sebagai perumusan dan penetapan kebijakan. Dukungan politik menetapkan bagaimana bentuk tata kelola negara, maka proses ini menghasilkan kebijakan publik sebagai sebuah respon terhadap masalah. Grindle (1980) berpendapat tentang letak pengambil kebijakan bahwa pengambil keputusan tersebar di seluruh wilayah geografis yang luas dan pemilik kebijakan tunggal milik organisasi birokrasi yang unit keputusannya tersebar secara organisasional. Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa lingkup yang sempit tidak terlalu banyak

koordinasi yang dilaksanakan oleh tim implementator dari program UPSUS PAJALE.

4.1.5 Pelaksana Program

Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa merupakan *leading sector* dari pelaksanaan program UPSUS PAJALE sesuai tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan dibidang pertanian. Untuk pelaksanaan dilapangan adanya petugas teknis diantaranya PPL, KUPT, POPT dan pihak lain yang turut terlibat. Winarno (2007:210) mengungkapkan sikap atau kecenderungan dari pelaksana akan memengaruhi bagaimana pelaksana menafsirkan pesan komunikasi kemudian akan diteruskan kepada pejabat dibawahnya.

4.1.6 Sumber Daya yang Dilibatkan

Suksesnya suatu implementasi program karena dukungan sumberdaya yang memadai dan saling mendukung. Sumber daya yang mendukung terlaksananya suatu implementasi meliputi: sumber daya manusia (*human resources*) dan sumber daya bukan manusia (*non-human resources*).

Sumber daya manusia pada program UPSUS PAJALE terdiri atas sumber daya aparatur pemerintah dan sumber daya masyarakat pertanian. Sumber daya sosial kelembagaan masyarakat dan sumber daya anggaran.

Sumberdaya merupakan hal penting dalam mengimplementasi suatu kebijakan. Menurut Edward III (1980:54):

Implementation order may be accurately transmitted, clear dan consistent, but if implementors lack the resources necessary to carry our policies, implementation likely to be in ineffective.

Perintah berupa implementasi dapat disalurkan secara akurat, jelas dan konsisten, akan tetapi jika pelaksana kebijakan (Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa) kekurangan sumberdaya yang penting untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi mungkin menjadi tidak efektif lagi.

4.2 Konteks Implementasi (Context of Policy)

4.2.1 Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat

Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa merupakan aktor dalam implementasi program UPSUS PAJALE, dengan kekuasaannya untuk melaksanakan strategi peningkatan produksi dan produktivitas. Hal ini dibuktikan dengan adanya penghargaan oleh Kementrian Pertanian pin emas dengan pencapaian 10 wilayah di Indonesia dengan produksi tertinggi. Aktor lain yang memiliki kekuasaan dan memiliki kepentingan terhadap implementasi program adalah partai politik. Adanya kelompok-kelompok aspirasi, dimana anggota kelompok

tani tersebut merupakan konstituen dari salah satu partai politik. Pada program UPSUS PAJALE ini pengaruh aktor lain selain dinas pertanian tidak mempengaruhi implementasi program UPSUS PAJALE, tidak terjadi tarik - menarik kepentingan yang mempengaruhi implementasi program UPSUS PAJALE. Kepentingan aktor lain selain dinas pertanian masih sejalan dengan tujuan program UPSUS PAJALE, yaitu peningkatan produksi dan produktivitas.

4.2.2 Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Karakteristik dari suatu lembaga akan berpengaruh pada suatu keberhasilan implementasi program. Winarno (2014:117) menjelaskan karakteristik suatu lembaga memegang peranan penting terhadap mudah tidaknya implementasi suatu program. Karakteristik suatu badan-badan pelaksana tidak dapat lepas dari struktur organisasinya, semakin kompleks suatu organisasi semakin sulit melakukan komunikasi dan koordinasi.

Dengan struktur organisasi berhubungan dengan sekumpulan keputusan strategi dari pembuat kebijakan dan menilai kapasitas suatu organisasi. Paramita (1985:17) membaginya menjadi: kompleksitas (*complexity*), formalisasi (*formalization*), dan sentralisasi (*centralization*), komunikasi, dan koordinasi.

Dalam hal ini koordinasi dan komunikasi apabila terlaksana dengan baik, maka program UPSUS PAJALE mudah untuk diimplementasikan, salah satu cara koordinasi dan komunikasi pada implementasi program UPSUS PAJALE adalah dengan mengadakan rapat koordinasi antar *stakeholder*, maupun kunjungan langsung untuk menyamakan visi. Koordinasi dan komunikasi antar instansi tidak mengalami kesulitan, teknologi informasi sudah digunakan untuk melakukan koordinasi dan komunikasi. Maka dapat disimpulkan koordinasi dan komunikasi di Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa dan *stakeholder* lainnya mudah, sehingga program UPSUS PAJALE menjadi lebih mudah untuk diimplementasikan.

4.2.3 Kepatuhan dan Daya Tanggap

Ukuran dasar dari suatu kebijakan dan tujuan kebijakan merupakan satu hal yang penting. Implementasi kebijakan dikatakan berhasil harus diikuti oleh kesadaran yang menyeluruh terhadap kebijakan tersebut. Kegagalan dalam suatu implementasi kebijakan sering kali diakibatkan karena ketidak patuhan atau tidak taatnya pelaksana kebijakan. Grindle (1980) menyebutkan bahwa lembaga-lembaga publik seperti birokrasi harus tanggap terhadap kebutuhan orang-orang yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan agar dapat terlayani. Selain itu, tanpa daya tanggap selama pelaksanaan, pejabat publik tidak mendapatkan informasi untuk mengevaluasi pencapaian program dan dukungan yang penting untuk keberhasilannya. Dalam banyak

kasus, bagaimanapun daya tanggap dapat berarti bahwa tujuan kebijakan tidak tercapai karena intervensi dari individu atau kelompok tertentu, baik untuk memperoleh produk atau jasa tertentu dalam jumlah yang lebih besar atau untuk menghalangi pencapaian program tertentu yang mungkin tidak mendapatkan manfaat dari kebijakan.

Implementasi program akan terlaksana dengan baik apabila adanya kepatuhan dan daya tanggap baik pelaksana maupun kelompok sasaran. Tugas dari implementator dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa untuk dapat menangkap kebutuhan-kebutuhan kelompok sasaran sehingga program dapat diimplementasikan dengan baik. Semakin tinggi kepatuhan dan semakin tinggi daya tanggap maka akan semakin mudah program diimplementasikan.

Pada kegiatan SRI yang dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa secara teknis dan sumber daya manusia masih pada tahap mengadopsi teknologi, sehingga aturan pada petunjuk teknis tidak dilaksanakan secara sempurna. Teknik budidaya yang masih dirasa sulit dan sumber daya pengairan tidak memadai menyebabkan kelompok sasaran tidak mengikuti aturan. Komunikasi aktif antara kelompok sasaran dan pelaksana program harus lebih intensif agar akses informasi tentang pelaksanaan program dapat diterima secara utuh.

Kepatuhan kelompok sasaran dapat dilihat pada saat menyerahkan kelengkapan administrasi kegiatan, pada hasil dapat dilihat bahwa petani mendapatkan benih bantuan hal tersebut merupakan bukti kepatuhan terhadap aturan, yaitu aturan kelengkapan dokumen kelompok.

Daya tanggap KUPT mendorong kegiatan-kegiatan dalam program UPSUS PAJALE berjalan sesuai aturan, dan tersampaikan kepada petani. Daya tanggap dapat dilihat pada saat penetapan CPCL, karena pelaksana KUPT atau PPL, tanggap terhadap kebutuhan dan kesesuaian terhadap aturan. Wilayah yang membutuhkan rehabilitasi jaringan irigasi maka melaksanakan kegiatan rehabilitasi akan diarahkan ke wilayah tersebut, seperti yang diungkapkan oleh salah satu petani pada saat menerima kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi.

5. Kesimpulan

Penelitian implementasi program UPSUS PAJALE di Kabupaten Sumbawa menyimpulkan bahwa dinas pertanian mudah diimplementasikan, tujuan peningkatan produksi dan produktivitas dapat dicapai. Implementasi baik dari isi kebijakan dan lingkungan kebijakan mendukung implementasi program UPSUS PAJALE dengan optimum. Luas tambah tanam (LTT) yang menjadi ukuran penambahan produksi dan produktivitas dapat dicapai.

Aktor yang berperan dalam implementasi program UPSUS PAJALE adalah Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, partai politik merupakan aktor lain dalam

implementasi program UPSUS PAJALE akan tetapi tidak mempengaruhi implementasi program UPSUS PAJALE karena tujuannya masih sejalan dengan tujuan implementasi program.

Daftar Pustaka

- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hamdi, Muchlis. (2014). *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Paramita, Budhi. (1985). *Struktur Organisasi di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Jakarta: BukuSeru.
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: Medpress.
- Yuwono, Triwobowo., Widodo, Sri., Darwanto, Dwidjono Hadi Darwanto., Masyuri., Indradewa, Didik., Somowiyarjo, Susanto., Hariadi, Sunarru, Samsi. (2011). *Pembangunan Pertanian*. Yogyakarta: UGM Press.